

Depdagri Akui Aset Kendala Audit BPK

Pontianak, BERKAT.

Kepala Seksi Wilayah 2 Subdit Pengelolaan Kekayaan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI (Depdagri), Riris Prasetyo saat di Pontianak mengungkapkan, aset menjadi hal yang penting karena laporan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) umumnya permasalahan aset menjadi salah satu penyebab kurang baik.

“Dalam laporan keuangan daerah, di sana ada neraca dan dalam neraca itu datanya sebagian besar dari laporan barang milik daerah,” ungkapnya.

Menurutnya, aset pada prinsipnya adalah untuk pelayanan publik. Namun ada satu permasalahan yang seringkali dihadapi

yakni aset yang sudah tidak ada di pemerintah daerah tetapi dalam catatan masih ada.

“Dan biasanya aset itu berasal dari tahun 80-an dan 90-an tetapi sampai sekarang catatannya masih ada. Dan yang lebih tidak enaknyanya lagi keberadaan catatan atau bukti itu sudah dicopy oleh BPK. Jadi, BPK tiap tahun akan tahu bahwa keberadaan aset itu sudah tidak ada tapi di buku kita masih ada,” paparnya.

Kemudian permasalahan lainnya terkait aset, lanjut dia, umumnya di pemerintah daerah meskipun struktur organisasi antara bidang aset dan bidang keuangan menjadi satu namun prak-

teknya bidang-bidang itu pekerjaannya masih terpisah.

Untuk itu, dia berharap pengelolaan aset atau barang milik daerah menjadi lebih baik dan tertib.

“Dan tentu saja yang kita harapkan tidak menjadi permasalahan diaudit BPK nanti,” ucapnya.

Masalah aset ini diakui Wakil Wali Kota Pontianak Paryadi, S.Hut bukan saja terjadi di Kota Pontianak saja, tetapi hampir terjadi di seluruh Indonesia.

“Kemampuan manajerial SDM kita harus ditingkatkan. Masalah kita adalah seluruh aset yang ada harus dicatat. Ini menjadi hitungan kita tentunya, karena kita selalu membuka tiap tahun masalah itu,”

katanya lagi.

Ia menjelaskan aset-aset yang harus dicatat, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak seperti fasilitas umum, lahan yang akan dijadikan perkantoran, semuanya harus dibenahi.

Sejumlah fraksi DPRD Kota Pontianak juga lebih menekankan masalah aset yang harus segera dibenahi pemerintah agar tidak menjadi catatan BPK-RI pada tahun anggaran berikutnya.

“Dalam penataan aset daerah, diantaranya yang memberikan izin hak guna bangunan, haruslah lebih selektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” kata Ketua Fraksi Golkar Mansyur, AR, dalam PUnya. (wti)